

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak;
 2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan kreativitas, dan kegiatan budaya;
 4. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
 5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 6. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; dan
 7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON II**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna, Alasan Pemilihan Dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p><u>Makna Indikator:</u> Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM Laki-laki sama dengan IPM Perempuan .</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> IPG merupakan indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan kepentingan gender.</p> <p><u>Perhitungan Indikator:</u> IPG : $\frac{1}{3} [Xede (1) + Xede (2) + Linc-Dist]$ Xede (1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pendidikan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan</p>	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov.Kalsel	DPPPA Prov.Kalsel

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Indeks Pembangunan Gender (IDG)	<p><u>Makna Indikator:</u> IDG adalah merupakan indikator komposit untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Indikator ini mampu menggambarkan peran perempuan dalam pembangunan dilihat dari partisipasi di bidang ekonomi dan politik</p> <p><u>Perhitungan Indikator:</u> IDG: 1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist) Ipar= indeks keterwakilan di parlemen IDM= indeks pengambilan keputusan Linc= indeks distribusi pendapatan.</p>	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov.Kalsel	DPPPA Prov.Kalsel
		3. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	<p><u>Makna Indikator :</u> Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p><u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang harus diberikan pencegahan dan penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak-haknya.</p> <p><u>Perhitungan Indikator :</u> Rasio Kekerasan terhadap Perempuan $RPr = \frac{\text{Jumlah Korban Perempuan}}{\text{Jumlah Perempuan 18 Thn ke atas di Kalsel}} \times 10.000$ Ran = $\frac{\text{Jumlah Korban Anak}}{\text{Jumlah Anak usia dibawah 18 Thn di Kalsel}} \times 1000$</p>		

Banjarbaru, Juli 2017

Kepala,



Hj. Husnul Hatimah, S.H, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19670705 199503 2 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(ESELON III)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan (Makna, Alasan Pemilihan Dan Perhitungan Indikator)	Penanggung jawab	Sumber data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1. Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan	1. Nilai Evaluasi SAKIP	<p>Makna Indikator: Nilai kenaikan persentasi Akuntabilitas kinerja pada SAKIP DPPPA</p> <p>Alasan Pemilihan: Indikator ini menunjukkan kenaikan nilai persentasi pada SAKIP DPPPA</p> <p>Cara Perhitungan : Kenaikan Nilai hasil Evaluasi SAKIP dapat menentukan persentasi kinerja dari Dinas PPPA</p> $\frac{\text{Nilai Persentasi SAKIP DPPPA tahun } n}{\text{Nilai Persentasi SAKIP DPPPA tahun } n - 1} \times 100\%$	Sekretariat	DPPPA, Hasil Evaluasi SAKIP
	2. Meningkatkan Koordinasi Bidang PPPA	2. Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi	<p>Makna Indikator: Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi akan lebih meningkatkan Sinergitas lintas sektor bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>Alasan Pemilihan: Indikator ini menunjukkan jumlah koordinasi yang harus ditindaklanjuti untuk pengembangan program DPPPA.</p> <p>Cara Perhitungan: Jumlah Rapat Koordinasi yang di Fasilitasi dapat mensinergikan urusan Bidang PPPA</p> $\frac{\text{Jumlah Rapat Koordinasi DPPPA tahun } n}{\text{Jumlah Rapat Koordinasi DPPPA DPPPA tahun } n - 1} \times 100\%$	Sekretariat	DPPPA, Hasil Evaluasi SAKIP

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	1. Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Provinsi	<p>Makna Indikator: SKPD yang menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga dengan melakukan PPRG untuk meningkatkan Keadilan dan Kesejahteraan Gender (KKG)</p> <p>Alasan Indikator : Tersusunnya anggaran yang responsif gender pada Belanja Langsung SKPD dapat meningkatkan Indikator IPG.</p> <p>Cara Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah SKPD Provinsi yang menyusun ARG tahun } n}{\text{Jumlah SKPD Provinsi yang menyusun ARG tahun } n - 1} \times 100\%$</p>	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (KHPK)	DPPPA
		2. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen	<p>Makna Indikator: Jumlah persentasi keterlibatan perempuan di parlemen menunjukkan keterwakilan peran serta perempuan dalam pemberdayaan perempuan dibidang politik.</p> <p>Alasan Indikator : Jumlah perempuan yang hampir sama dengan jumlah laki-laki yang mana kesempatan perempuan dalam menentukan kebijakan masih ada keterbatasan sehingga perlu peningkatan perempuan dalam memutuskan kebijakan yang responsif gender.</p> <p>Cara Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perempuan yang duduk di DPRD Prov. Kalsel Thn } n}{\text{Jumlah Anggota DPRD Prov. Kalsel Thn } n} \times 100\%$</p>	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (KHPK)	DPPPA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Persentase perkawinan usia anak di tingkat provinsi	<p>Makna Indikator: Pengurangan jumlah perkawinan anak ditingkat provinsi dapat mempengaruhi peningkatan kualitas hidup perempuan.</p> <p>Alasan Indikator : Menekan terjadinya perkawinan usia anak berpengaruh untuk mengurangi dampak kualitas hidup perempuan.</p> <p>Cara Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkawinan usia anak}}{\text{Jumlah seluruh perkawinan}} \times 100\%$</p>	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (KHPK)	DPPPA
3.	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kabupaten/ Kota menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak	<p>Makna Indikator: Meningkatnya nilai indikator dalam pemenuhan hak anak mempercepat Kab/Kota yang Layak bagi Anak untuk pemenuhan tumbuh kembang anak.</p> <p>Alasan Indikator : Indikator ini menunjukkan pra syarat untuk menjadikan kabupaten/kota layak anak</p> <p>Cara Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Kab/Kota KLA Minimal Pratama}}{\text{Jumlah seluruh Kab/Kota di Kalsel}} \times 100 \%$</p>	Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPPPA Prov. Kalsel
4.	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<p>Makna Indikator: Jumlah kekerasan yang dialami Perempuan yang dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum</p> <p>Alasan Indikator : Perempuan sebagai bagian sumber daya manusia yang mempunyai hak dan martabat untuk diberikan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi</p> <p>Cara Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO}}{\text{Jumlah perempuan usia 18 Thn ke atas di Prov. Kalsel}} \times 10.000$</p>	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	DPPPA, Hasil Evaluasi Survey

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Rasio kekerasan terhadap anak	<p>Makna Indikator: Perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan.</p> <p>Alasan Indikator : setiap anak didalam dirinya melekat hak dan martabat anak yang harus dilindungi untuk menjamin anak agar menjadi anak yang berkualitas sebagai generasi penerus pembangunan bangsa dan Negara</p> <p>Cara Perhitungan:</p> <p>Ran = $\frac{\text{Jumlah Korban Anak}}{\text{Jumlah Anak usia dibawah 18 Thn di Kalsel}} \times 1000$</p>		DPPPA Prov. Kalsel, Unit PPA

Banjarbaru, Juli 2017
Kepala,



Hj. Husnul Hatimah, S.H, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19670705 199503 2 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA

ESELON IV

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan (Makna, Alasan Pemilihan Dan Perhitungan Indikator)	Penanggung jawab	Sumber data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan dan aset	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan aset yang disusun sesuai peraturan	<p>Makna Indikator : Nilai komponen pelaporan yang baik menandakan laporan kinerja lebih akuntabel</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator ini dapat menunjukkan nilai pelaporan pada LKIP DPPP</p> <p>Cara Perhitungan : Nilai Komponen pelaporan pada LKIP DPPP tahun berjalan</p>	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	DPPP Prov, LKIP
	2. Meningkatkan kualitas pelaporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD semesteran dan akhir tahun yang disusun tepat waktu	<p>Makna Indikator : Nilai komponen perencanaan menandakan laporan kinerja lebih akuntabel</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator ini dapat menunjukkan nilai perencanaan pada LKIP SOPD</p> <p>Cara Perhitungan : Nilai Komponen perencanaan pada LKIP SOPD tahun berjalan</p>	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	DPPP Prov, LKIP
2.	1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDA aparatur yang mengikuti pelatihan formal	<p>Makna Indikator : Dokumentasi sarana dan prasarana yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator ini dapat menunjukkan jumlah dokumentasi pelayanan sarana dan prasarana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Cara Perhitungan : Jumlah dokumentasi sarana dan prasarana yang telah selesai pada tahun berjalan</p>	Subbag Umum dan Kepegawaian	DPPP Prov

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Meningkatkan penatausahaan kepegawaian	Jumlah aparatur DP3A yang dilayani di bidang kepegawaian sesuai prosedur	<p>Makna Indikator : pegawai yang administrasi kepegawaiannya telah dilayani dengan tertib sesuai SOP</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator ini dapat menunjukkan jumlah pegawai di DPPPA yang kepegawaiannya dapat dilayani dengan baik dalam tahun berjalan</p> <p>Cara Perhitungan : Jumlah dokumentasi sarana dan prasarana yang telah selesai pada tahun berjalan</p>	Subbag Umum dan Kepegawaian	DPPPA Prov
3.	Meningkatkan percepatan PUG melalui PPRG di SKPD Provinsi	Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi yang memahami tentang kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan	<p>Makna Indikator: Peningkatan Jumlah sosialisasi tentang kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan lingkup SKPD Provinsi</p> <p>Alasan Indikator : Perempuan yang memahami tentang PUG dan PPRG lingkup SKPD Provinsi</p> <p>Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perempuan yang memahami PUG dan PPRG}}{\text{Jumlah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi}} \times 100\%$	Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi	DPPPA Prov. Kalsel
		Jumlah SDM perencana yang terampil dalam PUG dan PPRG	<p>Makna Indikator: Peningkatan Jumlah SDM perencana yang terampil dalam PUG dan PPRG</p> <p>Alasan Indikator :</p> <p>SDM perencana yang memahami tentang PUG dan PPRG</p> <p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah SDM perencana yang terampil dalam PUG dan PPRG</p>	Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi	DPPPA Prov. Kalsel

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik	Jumlah peserta pelatihan yang terampil dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik	<p>Makna Indikator: Peningkatan peran serta perempuan dalam politik yang memahami tentang KKG</p> <p>Alasan Indikator : Terlatihnya kader partai politik dalam memahami isu tentang gender, dan anak diharapkan akan memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan yang responsif gender dan anak serta mampu menyuarakan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap kebijakan pembangunan</p> <p>Cara Perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang terampil dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik</p>	Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum	DPPPA Prov. Kalsel
		Jumlah paket KIE kesetaraan gender yang dibuat dan didistribusikan	<p>Makna Indikator: Peningkatan kesetaraan gender hak anak dalam pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)</p> <p>Alasan Indikator : Tercapainya pendistribusian paket pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang tepat sasaran dengan tujuan memahami kesetaraan gender hak anak.</p> <p>Cara Perhitungan: Jumlah paket KIE kesetaraan gender yang dibuat dan didistribusikan</p>	Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum	DPPPA Prov. Kalsel

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Meningkatkan pelaksanaan PUG dalam keluarga	1. Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi yang memahami tentang kebijakan peningkatan kualitas keluarga	<p>Makna Indikator: Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang menerapkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga</p> <p>Alasan Indikator : Pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga menunjukkan bahwa keluarga tersebut memiliki hubungan yang baik tidak hanya dalam keluarga tetapi juga di ruang publik</p> <p>Cara Perhitungan: Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi yang memahami tentang kebijakan peningkatan kualitas keluarga</p>	Seksi Kualitas Keluarga dan Sistem Data Informasi	DPPPA Prov. Kalsel
		2. Jumlah keluarga pra-sejahtera yang dibina	<p>Makna Indikator: Peningkatan jumlah keluarga pra-sejahtera menuju sejahtera merupakan indikator penting untuk menunjukkan sejauh mana peranan wanita di dalam keluarga.</p> <p>Cara Perhitungan: Jumlah keluarga pra-sejahtera yang dibina</p>	Seksi Kualitas Keluarga dan Sistem Data Informasi	DPPPA Prov. Kalsel
		3. Jumlah peserta yang memahami tentang pencegahan perkawinan usia anak	<p>Makna Indikator: aparaturnya pemerintah memiliki yang kompetisi sebagai fasilitator anak</p> <p>Alasan Indikator : Peningkatan kompetensi aparaturnya dalam memahami Hak-Hak Anak akan membantu dalam mewujudkan pembangunan yang responsif anak.</p> <p>Cara Perhitungan: Jumlah peserta yang memahami tentang pencegahan perkawinan usia anak</p>	Seksi Kualitas Keluarga dan Sistem Data Informasi	DPPPA Prov. Kalsel

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Meningkatkan peranan Gugus Tugas KLA Kab/Kota	Jumlah Gugus Tugas KLA Kab/Kota	<p>Makna Indikator: Untuk meningkatkan nilai evaluasi KLA tidak lepas dari peranan Gugus Tugas KLA.</p> <p>Alasan Indikator : Kelembagaan Gugus Tugas KLA sangat menentukan kemajuan dan perkembangan KLA suatu kabupaten</p> <p>Cara Perhitungan: Jumlah Gugus Tugas KLA Kab/Kota</p>	Seksi Hak Pendidikan dan Pengasuhan	DPPPA Prov. Kalsel
7.	Meningkatkan hak partisipasi anak dalam pembangunan	Jumlah anak yang berpartisipasi aktif dalam forum anak di tingkat daerah dan atau nasional	<p>Makna Indikator: peningkatan peran serta forum anak dalam pembangunan baik di tingkat daerah dan atau nasional</p> <p>Alasan Indikator : Forum Anak yang Aktif sebagai pelopor dan pelapor</p> <p>Cara Perhitungan: Jumlah anak yang berpartisipasi aktif dalam forum anak di tingkat daerah dan atau nasional</p>	Seksi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi	DPPPA Prov. Kalsel
8.	Meningkatkan penyedia layanan kesehatan yang berstandar ramah anak	Jumlah penyedia layanan kesehatan yang berstandar ramah anak	<p>Makna Indikator: Penyedia layanan kesehatan (puskesmas, peosyandu) yang berstandar ramah anak sangat diperlukan dalam upaya perlindungan dan emenhan hak anak</p> <p>Alasan Indikator : Dapat memprediksi kemajuan pemenuhan hak anak di daerah</p> <p>Cara Perhitungan: Jumlah penyedia layanan kesehatan yang berstandar ramah anak</p>	Seksi Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar	DPPPA Prov. Kalsel

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Meningkatkan pencegahan dan penanganan perlindungan perempuan termasuk TPPO	1. Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan perlindungan hak perempuan	<p>Makna Indikator: masyarakat yang dilatih dalam hal perlindungan perempuan</p> <p>Alasan Indikator : masyarakat memiliki peran sebagai mitra dalam upaya perlindungan terhadap perempuan, sehingga mendidik masyarakat untuk mengenali tanda-tanda kekerasan terhadap perempuan akan mempermudah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan</p> <p>Cara Perhitungan: Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan perlindungan hak perempuan</p>	Seksi Perlindungan Perempuan	DPPPA Prov. Kalsel
		2. Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani oleh petugas terlatih	<p>Makna Indikator: aparat pemerintah/masyarakat yang dilatih dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)</p> <p>Alasan Indikator : Pentingnya pemahaman aparat pemerintah/masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)</p> <p>Cara Perhitungan: Jumlah perempuan korban kekerasan yg ditangani petugas terlatih</p> $\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani}} \times 100.000$	Seksi Perlindungan Perempuan	DPPPA Prov. Kalsel

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Jumlah laporan pencegahan dan penanganan TPPO	<p>Makna Indikator: Menunjukkan keaktifan petugas Provinsi/kabupaten/kota dlm melaporkan kegiatan pencegahan dan penanganan indikator</p> <p>Alasan Indikator : penting untuk bahan pengambilan keputusan dalam pencegahan dan penngnn TPPO</p> <p>Cara perhitungan: Jumlah laporan pencegahan dan penanganan TPPO yang dibuat</p>		
10.	Meningkatkan pencegahan dan penanganan perlindungan khusus anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus anak	<p>Makna Indikator: Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0 – 18 tahun</p> <p>Alasan Indikator : Peningkatan jumlah kasus kejahatan terhadap anak menjadikan perlunya pencegahan kekerasan yang melibatkan para pihak.</p> <p>Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus}}{\text{Jumlah seluruh anak}} \times 100.000$	Seksi Perlindungan Anak	DPPPA Prov. Kalsel

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Meningkatkan akses data kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah admin dan operator yang melaksanakan Updating data e-Kekerasan Perempuan dan Anak	<p>Makna Indikator: Operator aplikasi data e-kekerasan yang terampil pada unit layanan terpadu</p> <p>Alasan Indikator : Untuk mengoptimalkan upaya pemenuhan data gender dan anak dari instansi-instansi pemerintah</p> <p>Cara Perhitungan: Jumlah SDM Operator Aplikasi Data e-kekerasan yang terampil pada unit layanan terpadu</p>	Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak	DPPPA Prov. Kalsel

Banjarnbaru, Juli 2017

Kepala,



Hj. Husnul Hatimah, S.H, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19670705 199503 2 004